



Teras Malioboro, lokasi yang akan digunakan untuk pemindahan PKL Malioboro. Bangunan tersebut sebelumnya merupakan eks gedung Bioskop Indra.

► PENATAAN KAWASAN MALIOBORO

Relokasi PKL Sudah Taat Prosedur

Sunartono, & Sirojul Khafid
 redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Proses penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro sudah sesuai prosedur dan sejalan dengan indikator asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerapkan suatu kebijakan relokasi.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Hangga Fathana, menilai dalam melihat suatu kebijakan pemerintah dan negara, di mana pun itu, indikator inklusivitas harus menjadi asas yang dikedepankan. Untuk mengukurnya, bisa menggunakan sejumlah indikator, salah satunya yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Ada tiga indikator antara lain, pasar, ruang, dan layanan.

"Hampir di semua negara, saya

kira semua kebijakan baru itu mengundang pro dan kontra, hanya beda skalanya saja. Selama pemerintah menjamin inklusivitas, untuk jangka panjang, tidak masalah, ini sejalan dengan redistribusi kesejahteraan," katanya, Selasa (25/1).

Jika dilihat dari indikator pertama, pasar atau aktivitas ekonomi, kebijakan bisa dilihat terbuka atau tidaknya dengan melihat pemberian ruang untuk beraktivitas ekonomi dari para pelaku ekonomi. "Saat ini aktivitas ekonomi masih berjalan, setelah kebijakan penataan pun PKL masih ada," ujarnya.

Kemudian indikator kedua yakni ruang. Menurutnya kebijakan penataan PKL Malioboro ini tetap memberikan ruang bagi para pelaku yang ada di sekitar kawasan Malioboro. Hanya

secara teknis dari awalnya di lorong sepanjang jalan, kini dipindah ke lokasi terpadu di dua lokasi dalam hal ini lahan eks Dinas Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra. "Sehingga dari sisi ruang sudah dijamin negara, ini bukan kemudian pelakunya tidak boleh ada situ. Mereka tetap diberikan ruang. Jadi secara substansi indikator ini tetap terpenuhi."

Kemudian indikator ketiga, layanan. Menurutnya dari pemantauannya, Pemda DIY dan Pemkot Jogja tidak menjadikan penataan PKL ini sebagai kebijakan terakhir. Setelah itu ada desain skenario, pemerintah berkomitmen agar aktivitas ekonomi di Malioboro tetap maksimal.

► Halaman 10

Relokasi PKL...

Sehingga hal ini merupakan bentuk layanan yang disediakan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan para pemangku kepentingan di Malioboro. "Dari sini bisa kami simpulkan tiga indikator tadi terpenuhi, sehingga kebijakan ini memiliki visi tujuan sebagaimana disampaikan juga oleh Pemda DIY, memulihkan Malioboro. Ini sesuai indikator inklusivitas yang ditentukan oleh Bank Dunia," ucapnya.

Dosen Arsitektur UII, Revianto Budi Santoso, mengatakan Malioboro memang banyak kepentingan mulai dari kepentingan filosofi, historis, wisata, dan mencari nafkah seperti toko, PKL dan sejenisnya. Ada pula kepentingan budayawan atau seniman yang dahulu banyak berkarya di sekitar Malioboro. "Malioboro kepentingannya banyak orang secara langsung maupun tidak langsung, termasuk para penyair yang membuat Jogja terbuak dari pulang, rindu dan angkringan kalau bukan Jokpin yang orang akan merasakannya di Malioboro."

Menurutnya ada beberapa hal dalam penataan Malioboro, pemerintah mesti mengampuni berbagai kepentingan dari banyak pihak. Kian banyak pihak yang kepentingannya diakomodasi maka hal itu menjadi yang terbaik. Selanjutnya ketika perencanaan tersebut jangka panjang, dalam situasi saat ini sangat sulit untuk bisa memastikan. Terkait dengan kepastian ini berlaku di berbagai

tempat tidak hanya Malioboro tetapi di beragam kota di dunia. "Perubahan itu sesuatu yang mungkin sehingga perencanaan jangka panjang perlu bersifat adaptif mampu untuk merespons perubahan," katanya.

Tunggu Belasan Tahun
 Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan pelaksanaan relokasi PKL sudah bulat dan secara resmi akan dimulai hari ini, Rabu (26/1). Sultan menyatakan Pemda telah menunggu 18 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para PKL agar tidak mengkhintai trotoar Malioboro.

Soal adanya sejumlah PKL yang meminta relokasi diundur, Sultan menegaskan permintaan itu tidak bisa dipenuhi. "Enggak, enggak, *aku wis ngenteni* [saya sudah menunggu] 18 tahun, jadi *ora mung mundur telung tahun* [jadi kesempatan yang saya berikan tidak hanya tiga tahun seperti permintaan PKL], *aku wis ngenteni* 18 tahun [tetapi saya sudah memberikan kesempatan mundur selama 18 tahun]."

Sultan juga merespons permintaan kompensasi. Menurutnya berbagai fasilitas telah disediakan bagi para PKL di tempat baru yang masih berada di kawasan Malioboro. Jika PKL minta ditunda, Sultan justru meminta agar dipercepat di gedung sisi lain.

Ayah lima putri ini memberikan alasan mendesak relokasi itu karena lahan yang ditempati bukan milik PKL. "Karena tempat itu

bukan milik dia [PKL]. Milik toko dan pemerintah. Bukan fasilitas kaki lima. Jadi *ora usah mundur* tiga tahun [tidak perlu menunggu tiga tahun], *saiiki isa, kenapa besok* [kalau sekarang bisa kenapa harus besok]," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, menjelaskan model lapak yang disediakan untuk PKL Malioboro di eks Gedung Indra memang menarik. Didesain dengan gaya semi industrial, dengan interior kombinasi antara besi dengan kayu. Model lapak juga dibuat menyesuaikan kebutuhan PKL seperti adanya tempat menyimpan stok barang. "Modelnya itu semi industrial, karena bangunan eks Gedung Indra juga industrial sehingga harus disesuaikan, seperti luasan, harus diberikan tempat saat mereka menyajikan, di bawahnya ada rak atau *storage* untuk menahan dagangan stok."

La menambahkan lapak yang berada di lantai satu dan lantai dua akan ditempati PKL yang menjual esyren, kerajinan, dan makanan kering. Sedangkan warung makan atau siap saji disediakan di gedung sisi lain.

"Lantai I dan II, itu yang pasti kering, *craft*, esyren dan kulliner kering, artinya bukan yang masak atau siap saji, kalau makanan siap saji [jenis warung lesehan] di gedung sisi lain. Memang sudah diperuntukkan untuk itu mesti sudah diberikan sarana saluran air, cucu tangan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005